



MODAL SOSIAL MUKTI DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN KEPALA DESA DUA PERIODE DI DESA POHGADING KECAMATAN PRINGGABAYA

Dimas Aji Prayoga¹; Ayatullah Hadi²; Inka Nusamuda Pratama

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

¹Correspondence Email: pyoga8695@gmail.com

Received: November 16, 2023

Accepted: December 17, 2023

Published: December 31, 2023

Abstract

Kemenangan kembali Mukti pada pilkades Desa Pohgading periode 2020-2026 menimbulkan pertanyaan bagi peneliti modal sosial apa yang dimiliki oleh Mukti sehingga memenangkan kembali Pilkades Desa Pohgading pada periode tahun tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat dijelaskan bahwa Mukti memiliki figure pemimpin yang baik yang dapat mengayomi dan memahami karakter dan kondisi Masyarakat serta memiliki integrasi dalam kiprahnya sebagai mantan prajurit TNI sebagai babinsa. Hal tersebut yang menjadikan Mukti percaya dan didukung oleh sebagian Masyarakat Pohgading untuk menjadi kepala desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya. Dengan begitu Mukti memiliki modal sosial yang cukup untuk mengikuti kontestasi politik pemilihan kepala desa pada periode pertama 2013-2019 sampai periode ke dua 2020-2026. Interaksi sosial yang dilakukan Mukti dengan Masyarakat di desa Pohgading menjadi salah satu faktor terbentuknya perolehan modal sosial Mukti dengan Masyarakat sehingga terjalin hubungan antara ke dua pihak tersebut.

Keywords: Figur pemimpin; Modal Sosial; Kontestasi Politik.

A. Pendahuluan

Demokrasi menempatkan proses penggantian penguasa secara beradab (pemilu) sebagai hal yang paling utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Bahkan Miriam Budiarjo menilai pada kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu lambang dan tolok ukur pelaksanaan demokrasi (Budiharjo Miriam, 2008). Suksesi pergantian penguasa secara demokratis akan mewujudkan penyelenggaraan ketatanegaraan yang relatif stabil dibandingkan dengan suksesi penggantian penguasa secara revolusi ataupun secara kekerasan. Pada sisi lain pemilihan umum berfungsi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan pilihan masing-masing. Penyelenggaraan pemilihan umum menjadi tolok ukur sejauhmana tata kehidupan bernegara dikemudikan pada rel kedaulatan rakyat dan demokrasi (Mar'iyah, 2017).

Pelaksanaan Pilkades pada dasarnya merupakan manifestasi kedaulatan Masyarakat Desa Pohgading yang paling riil. Hal ini berarti Desa bukanlah ruang geografi kosong yang berjarak dari sosial budaya manusia yang tinggal di dalamnya, sebaliknya Desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya beserta tradisi dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan itu. Pilkades sebagai demokratisasi Desa berarti upaya untuk menggerakkan demokrasi dalam kekhasan Desa itu dengan semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi Desa (Naeni, 2015).

Dalam pelaksanaannya begitu mendetail keterkaitan antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Sehingga, perlu ketelitian dari tiap calon pemilih dalam menilai calon pemimpin yang akan dipilihnya tersebut. Namun pilkades terasa lebih spesifik dari pada pemilu-pemilu di atasnya. Yaitu adanya kedekatan dan keterkaitan secara langsung antara pemilih dan para calon. Sehingga, suhu politik di lokasi sering kali lebih terasa dari pada saat pemilu pemilu yang lain. Pengenalan atau sosialisasi terhadap calon-calon

pemimpin bukan lagi mutlak harus lagi penting. Para bakal calon biasanya sudah banyak dikenal oleh setiap anggota Masyarakat yang akan memilih.

Namun demikian sosialisasi program atau visi misi sering kali tidak dijadikan sebagai media kampanye atau pendidikan politik yang baik. Kedekatan pribadi, akan sering kali banyak dipakai oleh Masyarakat untuk menentukan pilihannya. Di sini unsur nepotisme masih begitu kental membudaya. Demikian juga dengan kolusi, hubungan baik dalam berbagai posisi juga banyak dijadikan sebagai unsur penentuan hak pilih.

Demikian juga dengan unsur *Money politic* yang sering dijadikan iming-iming dorongan dalam pemilihan. Hal demikian akan menjadikan para calon harus mengeluarkan biaya yang begitu besar. Persaingan antar calon sering kali juga terjadi dengan berlebihan. Kalau demikian ini yang terjadi usaha penghapusan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) akan terasa sulit diwujudkan. Di sini pendidikan politik perlu dikembangkan. Kerelaan berkorban untuk kepentingan Desa yang juga merupakan bagian dari bangsa dan negara ini tentu perlu diwujudkan. Tidak semua pengorbanan harus diukur dengan kontribusi uang. Kalau budaya *money politic* di tingkat Desa bisa dikikis, tentu sedikit demi sedikit di tingkat yang lebih atas hingga pemilihan presiden akan dapat diwujudkan proses pemilihan pelaksana pemerintahan yang jujur dan adil (Grobokan, 2020). Termasuk juga Pilkades di Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Selama berdiri dari tahun 1951 sebagai Desa definitif Desa Pohgading telah melaksanakan Pilkades selama 13 kali.

Terpilihnya Mukti menjadi kepala Desa Pohgading pada periode 2013-2019 setelah memenangkan prolehan suara 1.902 (33,14%) dari 5 orang pesaingnya seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Pemilihan Kepala Desa Pohgading Periode 2013-2019

Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Suara	Persentase Suara
Airmawati	996	17.35%
H. Rusna	968	16.87%
H. Sahabudin	910	15.86%
Hamdi Rahman	963	16.78%
Mukti	1902	33.14%
Total	5739	100%

Sumber: Pemerintah Desa Pohgading, 2019

Mukti selama menjabat sebagai kepala Desa Pohgading pada periode 2013-2019 belum menunjukkan kinerja yang bagus terbukti dengan banyaknya program-progam yang dijanjikan ketika proses kampanye belum terealisasi seperti penanganan sampah di Desa Pohgading yang mana dari periode pertama sampai periode ke dua belum trealisasi karena beberapa faktor seperti tidak adanya TPA di Desa Pohgading, dimana TPA di Desa Ijobalit adalah milik pemda oleh karenanya harus ada koordinasi dari pemerintah daerah jika akan melakukan pembuangan. Dan kurangnya anggaran terlebih hal tersebut sudah masuk APBDES yang harus di trealisasikan sehingga banyak Masyarakat yang kurang puas terhadap kinerja kepemimpinan Mukti.

Pilkades Desa Pohgading tahun 2020-2026 diikuti oleh 5 calon dan dimenangkan kembali oleh Mukti dengan perolehan suaran 2.011 (35,80%) setelah bersaing ketat dengan H. Rusna dengan perolehan suaran 2.004 (35.68%) dengan perbedaan perolehan suara sebanyak 7 suara (0,12%), seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Pemilihan Kepala Desa Pohgading Periode 2020-2026

Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Suara	Persentase Suara
Zuhud Moushaf	415	7.39%
H. Rusna	2004	35.68%
Marzuki	509	9.06%
Mukti	2011	35.80%
Ubaidillah	678	12.07%
Total	5617	100%

Sumber: Pemerintah Desa Pohgading, 2019

Komparasi yang bisa dilakukan pada terpilihnya kembali Mukti pada pemilihan Kepala Desa Pohgading Tahun 2013-2019 yang banyak melakukan pendekatan kepada kaum muda di Desa Pohgading dengan memberikan dukungan-dukungan kegiatan kepemudaan seperti pertandingan olahraga, membantu kaum muda dalam bentuk bantuan modal dan *soft skill* seperti mengadakan kursus dan pelatihan gratis, sementara terpilihnya kembali Mukti pada pemilihan Kepala Desa Pohgading Tahun 2020-2026 dengan hasil perhitungan suara yang cukup ketat, Mukti hanya melanjutkan program kerja yang belum teralisasi pada periode sebelumnya. Pemilihan Kepala Desa Pohgading secara khusus dan pemilihan kepala Desa di Seluruh Indonesia pada proses pemilihan Langsung yang mulai dilaksanakan pada tahun 2009 tidak terlepas dari Issu *Money Politic*. ICW (*Indeks Corruption Watch*) mencatat Pemilihan Kepala Daerah dan Kepala Desa di Indonesia hamper 83% terindikasi *Money Politic* (ICW, 2018). Tradisi memberikan uang memang bukan hal yang baru dalam proses pemilihan kepala Desa, namun di masa lalu pemberian uang lebih bersifat sukarela dan lebih sebagai tali asih untuk permintaan doa restu kepada warga. Dalam konteks kekinian pemberian uang dari calon kepala Desa lebih bersifat transaksional dan dilakukan secara terbuka.

Fenomena politik uang dalam proses pemilihan telah menjadi gejala yang sangat umum dan mudah dijumpai dalam berbagai aktivitas

pemilu baik itu Pemilu legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah, dan tidak ketinggalan dalam Pemilihan Kepala Desa. Bahkan Masyarakat Desa yang dulu sangat dikenal memegang teguh nilai-nilai kebaikan bersama sekarang semakin toleran terhadap pemberian uang yang diberikan secara terbuka dan mengarah pada jual beli suara (Astuti, P., 2022).

Praktek politik uang dalam Pilkades menjadi hal yang sangat tidak menguntungkan bagi pembelajaran demokrasi karena calon menggalang dukungan dari Masyarakat lebih mengandalkan pada uang bukan visi dan program yang secara langsung disampaikan kepada Masyarakat. Praktek politik uang juga dapat menjadi penyebab lunturnya nilai-nilai moralitas Masyarakat Desa karena bagaimanapun politik uang merupakan tindakan tidak terpuji dan tidak sejalan dengan nilai dan prinsip moralitas (Astuti, 2022).

Kemangan kembali Mukti pada pilkades Desa Pohgading periode 2020-2026 menimbulkan pertanyaan bagi peneliti modal sosial apa yang dimiliki oleh Mukti sehingga memenangkan kembali Pilkades Desa Pohgading pada periode tahun tersebut.

B. Metode

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu studi kasus, waktu Penelitian, Penelitian ini direncakan dilaksanakan pada bulan Januari 2023, lokasi dari penelitian ini adalah pada Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, informan Penelitian sebagai berikut: Kepala Desa Pohgading, Masyarakat, dan timses (tim sukses).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data, oleh karena itu teknik penelitian yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun instrument yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah: Pedoman wawancara (daftar pertanyaan) dan pedoman observasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan

masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan responden serta informasi lain mengenai modal sosial Mukti dalam memenangkan pemilihan kepala Desa dua periode di Pohgading Kecamatan Pringgabaya dilingkup Desa. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami sehingga dapat menyimpulkan modal sosial Mukti dalam memenangkan dua periode pemilihan kepala Desa di Pohgading, Kecamatan Pringgabaya di lingkup Desa.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

a) Kepercayaan

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para calon untuk mereka pengaruh dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada calon yang mereka percayai dengan harapan calon itu bisa naik menjadi pemimpin mereka seperti halnya dengan terpilihnya bapak Mukti dua periode sebagai kepala Desa bahwa Masyarakat percaya dan yakin untuk memilih bapak Mukti untuk menjadi kepala Desa tentunya sebelum bapak Mukti mencalonkan diri sebagai kepala Desa ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh bapak Mukti sehingga Masyarakat dan kepercayaan seorang pemilih seringkali terbentuk oleh suatu faktor yang satu sama lainya saling mempercayai. Adapun kepercayaan pemilih lainya karena kedekatan dengan calon, bisa juga karena calon tersebut ada keluarga, sahabat, dan rekan kerjanya.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Srijudin selaku pendukung bapak Mukti mengatakan bahwa:

“Dia langsung turun dan menyentuh Masyarakat serta berani dor to dor terhadap Masyarakat untuk membangun kepercayaan, dia keliling dan masuk secara individu didatangi, disitu ditanamkan kepercayaan oleh pak Muktidan kepemimpinan dua Periode itu dia melakukkan seperti itu dalam arti merakyat”.

Berdasarkan dengan hasil wawancara di atas, Mukti telah mengantongi modal sosial sehingga Masyarakat mengenal dengan baik nama dan wajah Mukti, sehingga Masyarakat Desa Pohgading telah mengetahui profesi dan kompetensi Mukti. Modal awal Mukti sebagai TNI dan menjadi babinsa di Desa Pohgading yang dikantongi Mukti membuat mayoritas Masyarakat Desa Pohgading khususnya mengetahui dan mengenalnya. Tidak hanya diketahui dan dikenal, tahapan selanjutnya telah dilalui Mukti bisa membuat Masyarakat Desa Pohgading salut khususnya Desa Pohgading menyukai dirinya.

Tabel 3. Daftar perolehan suara masing-masing calon kepala Desa Pohgading 2013-2019 :

No	Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Suara	Persentase Suara
1	Airmawati	996	17.35%
2	H. Rusna	968	16.87%
3	H. Sahabudin	910	15.86%
4	Hamdi Rahman	963	16.78%
5	Mukti	1902	33.14%
Total		5739	100%

Sumber: Pemerintah Desa Pohgading, 2019

Pada periode 2013-2019 belum menunjukkan kinerja yang bagus terbukti dengan banyaknya program-progam yang dijanjikan ketika proses kampanye belum terealisasi seperti penanganan sampah dan penyaluran bantuan langsung tunai.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan ahmad saifudin mengatakan bahwa:

“Dampak sosial yang diberikan kepada Masyarakat tidak ada dampak positifnya tapi dampak negatif mulai dari menilai kebijakannya. Padhal dia selaku penyelenggara Negara tidak ada dampak terkecil dari kewajibanya mensejahterakan yang tidak terpenuhi. Masyarakat tidak diberikan informasi mulai dari penggunaan anggaran APBD lebih-lebih anggaran Desa entah bantuan langsung tunai”.

Di Desa Pohgading yang mana dari periode pertama sampai periode ke dua belum trealisasi karena beberapa faktor seperti tidak adanya TPA di Desa Pohgading, dimana TPA di Desa Ijobalit adalah milik pemda oleh karenanya harus ada koordinasi dari pemerintah daerah jika akan melakukan pembuangan. Dan kurangnya anggaran terlebih hal tersebut sudah masuk APBDES yang harus di trealisasikan sehingga banyak Masyarakat yang kurang puas terhadap kinerja kepemimpinan Mukti.

Tabel 4. Daftar perolehan suara masing-masing calon kepala Desa Pohgading 2020-2026 :

No	Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Suara	Percentase Suara
1	Zuhud Moushaf	415	7.39%
2	H. Rusna	2004	35.68%
3	Marzuki	509	9.06%
4	Mukti	2011	35.80%
5	Ubaidillah	678	12.07%
Total		5617	100%

Sumber: Pemerintah Desa Pohgading, 2019

Komparasi yang bisa dilakukan pada terpilihnya kembali Mukti pada pemilihan Kepala Desa Pohading Tahun 2013-2019 yang banyak melakukan pendekatan kepada kaum muda di Desa Pohgading dengan memberikan dukungan-dukungan kegiatan kepemudaan seperti pertandingan olahraga, membantu kaum muda dalam bentuk bantuan modal dan *soft skill* seperti mengadakan kursus dan pelatihan gratis.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Martias Wulan Dari mengatakan bahwa:

“Karena beliau sangat cerdas menyentuh secara langsung anak muda dengan itu apa yang menjadi keinginan anak muda itu cepat diserap sotohnya dicabang olahraga”

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Suparlan mengatakan bahwa:

“Sederhana dan apa adanya sehingga Masyarakat percaya terhadap Mukti, jadi Masyarakat sangat senang dan loyal dalam arti Masyarakat tetap mengharapkan Mukti untuk jadi kepala Desa untuk yang kedua kalinya. Dan Mukti mempunyai sifat kedermawannya dengan salah satu contoh ketika Mukti dimintai uang oleh Masyarakat yang tidak sengaja apabila bertemu dengan Mukti, dan Masyarakat itu langsung diberikan oleh Mukti”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, suparlan begitu senang dan loyal kepada Mukti karena sifat kedermawanan, sederhana, dan apa adanya dari seorang Mukti. Dilihat dari Mukti yang memberikan uang kepada Masyarakat, dan tidak itu juga suparlan berharap Mukti dapat menepati janji-janjinya apabila terpilih kembali, dari sana Mukti mendapatkan kepercayaan dan harapan untuk memenangkan pemilihan kepala Desa selanjutnya.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Mukti selaku kepala Desa terpilih mengatakan bahwa:

“Ada namanya musdes (Musyawarah Desa) semua dilibatkan tokoh Masyarakat termasuk tokoh agama, tokoh pemuda dan kawil. Mana kira-kira yang segala prioritas yang akan dibangun dan kalo masih agak layak dijalankan mungkin tahun depan dan uang yang khusus untuk

membangun ini adalah uang negara yang penting kita transparan yang mana dikerjakan dan nanti kawil-kawil ini akan tau persis dan tanpa kawil ini juga RT terutama kader”.

Dari penjelasan Mukti di atas, maka dapat diketahui bahwa janji-janji kampanye memang ada seperti pembangunan saluran irigasi reban paja salah satunya. Sehingga peneliti dapat melihat bahwa Mukti sudah menepati janji dengan merealisasikannya.



Gambar 1. Pembangunan saluran irigasi reban paja

Berdasarkan gambar di atas peneliti dapat menjelaskan bahwa Mukti telah membangun saluran irigasi reban paja, gambaran tersebut berlokasi di Desa pogading dusun gubuk daya adapun pembiayaan pembangunan saluran irigasi reban paja adalah 161.884.000,00 dengan volume output 250 meter.

b) Jaringan

Kemenangan Mukti raih tidak terlepas dari bantuan tim kemenangan, kepercayaan dengan masyarakat tidak hanya dibutuhkan oleh Mukti, namun juga dibutuhkan tim kemenangan.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Srijudin selaku pendukung bapak Mukti mengatakan bahwa:

“System jaringan yang dibuat oleh Mukti adalah jaringan sistem multilevel yaitu jaringan yang mencari satu dengan yang lainnya. Dan dia turun ke Masyarakat, sebab Masyarakat percaya dengan dia karena dia bisa menyentuh Masyarakat. Dan juga dia menggunakan system dor to dor dengan langsung dapat berkomunikasi langsung dengan Masyarakat

itulah yang dilakukan oleh pak Mukti untuk mencari jaringan di Masyarakat. Dia memiliki jaringan yang banyak karena menggunakan system multilevel, jadi dikumpulkanya antara satu orang dengan yang lainnya seperti model lingkaran dalam arti saling berhubungan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Mukti dengan timsesnya selalu melakukkan kerjasama yang masif dengan dilihat pada pernyataan di atas bahwa Mukti melakukkan dor to dor dengan maksud untuk secara langsung berintraksi dengan Masyarakat atau menyentuh masyarakat dan upaya ini dapat memberikan rasa percaya kepada Masyarakat dengan memberikan penilaian dari Masyarakat terhadap Mukti, bahwa mutki sudah bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

c) Nilai dan Norma

Kemenangan Mukti tidak terlepas dari Nilai dan Norma yang diterapkan di tengah kehidupan masyarakat di desa Pohgading.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Martias Wulan selaku Masyarakat sebagai berikut:

“Di norma sosial karena kita di Masyarakat Pohgading masih kental system gotong royongnya dan ketika ada kegiatan maulid dan acara tambahan seperti sunatan masal, dan lomba adzan beliau hadir, dan ikut mensuport”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas Mukti menerapkan norma sosial di lihat dari hasil wawancara di atas dimana Mukti selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti kegiatan maulidan dan sunatan masal dengan begitu Masyarakat sangat antusias sekali mengikuti kegiatan tersebut karena Masyarakat dapat berdekatan langsung dengan Mukti. Hal itu juga di jelaskan oleh narasumber lainnya yang mana, Mukti juga menerapkan norma sosial dan lebih paham di norma sosial dilihat dari rekam jejaknya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat dijelaskan bahwa Mukti memiliki figure pemimpin yang baik yang dapat mengayomi dan memahami karakter dan kondisi Masyarakat serta memiliki integrasi dalam kiprahnya sebagai mantan prajurit TNI sebagai babinsa. Hal tersebut yang menjadikan Mukti percaya dan didukung oleh sebagian Masyarakat Pohgading untuk menjadi kepala desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya. Dengan begitu Mukti memiliki modal sosial yang cukup untuk mengikuti kontestasi politik pemilihan kepala desa pada periode pertama 2013-2019 sampai periode ke dua 2020-2026.

Dari tiga indikator modal sosial yaitu kepercayaan, jaringan, nilai dan norma tersebut dapat disimpulkan bahwa terpilihnya Mukti menjadi kepala desa dua periode di desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya karena modal kepercayaan disebabkan kedekatanya secara kekeluargaan, sosial yang sudah lama dibangun sebelumnya. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial Mukti dalam pemilihan kepala desa dua periode di desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya. Dan interaksi sosial yang dilakukan Mukti dengan Masyarakat di desa Pohgading menjadi salah satu faktor terbentuknya perolehan modal sosial Mukti dengan Masyarakat sehingga terjalin hubungan antara ke dua pihak tersebut.

Dimana temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kontestasi politik umumnya tidak bias diperoleh melalui jalan pintas untuk mencapai kemenangan, dimana modal sosial yang dimiliki kandidat menempati posisi penting sebagai modal yang mempengaruhi berhasilnya kandidat dalam kontestasi politik tersebut, proses perolehan modal sosial tidaklah di dapat secara instan, namun dilakukan dalam proses yang relative cukup lama yang di dalamnya membentuk berbagai relasi antara kandidat dengan Masyarakat pendukungnya, sesuai dengan kedudukan dan peran yang dijalankan kandidat yang bilamana dioptimalkan dan dimanfaatkan dengan baik akan turut menentukan menangnya kandidat dalam arena politik.

Persembahan

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada orang tua saya yang selalu memberikan support dan doa untuk saya bisa menyelesaikan karya ilmiah ini dan terimakasih untuk keluarga, sahabat, kerabat, dan terakhir pujaan hati saya yang tak luput memberikan dorongan agar supaya saya tetap semangat dan giat untuk menyelesaikan karya ilmiah tersebut.

Daftar Pustaka

- Astuti, P., & M. (2022). *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan bagi Pemilih?* JIIP.
- Budiharjo Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Grobongan, P. K. (2020). *Pilkades dan Pembelajaran Politik*.
- ICW. (2018). *money politik Pilkada dan Pilkades*.
- Mar'iyah, C. (2017). Pemilihan Umum, Partai Politik dan Demokrasi: Antara Tafsir Konstitusi dan Praktik Politik. *Jurnal Ketatanegaraan*, 005, 91–128.
- Naeni, A. (2015). *Demokratisasi Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.